

## KEBERDAYAAN DAN EKONOMI RUMAH TANGGA PETANI SAWIT DI KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh : Rosnita

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan sumberdaya alam yang berlimpah. Sebutan daerah minyak untuk provinsi ini dapat dilihat dari kandungan minyak yang terdapat di perut bumi dan CPO dari kelapa sawit yang berada dipermukaan bumi.

Letak wilayah provinsi ini sangat strategis karena berada di alur perdagangan Internasional (Selat Malaka) yang berhadapan dengan Negara Singapore dan Malaysia. Disisi lain berada di alur Lintas Timur Sumatera yang merupakan wilayah yang cepat tumbuh dan berkembang.

Dalam mengisi kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Riau mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu : 1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia, 3) pembangunan kesehatan dan olah raga, 4) pembangunan seni budaya, dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai provinsi ini pada tahun 2010 sebesar 7,16 persen (tanpa migas) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6,56 persen. Pertumbuhan yang telah dicapai tersebut 3,95 persen berasal dari sektor pertanian. Jika dilihat tahun sebelumnya, pada tahun 1996 sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat di pedesaan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2 persen. Tingginya pertumbuhan sektor pertanian karena ditunjang oleh tanaman perkebunan yang berorientasi ekspor terutama kelapa sawit, karet, dan kelapa (Syahza, 2007a).

Kelapa sawit merupakan komoditi primadona dari tanaman perkebunan yang dimiliki daerah ini. Luas areal perkebunan sawit tahun 2011 sebesar 2.103.175 Ha dari 8.915.015,09 Ha luas wilayah Provinsi Riau dengan jumlah produksi tandan buah segar (TBS) sebesar 6.293.541 ton.

Terdapat beberapa alasan kenapa pemerintah Provinsi Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: *pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit; *kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain; *ketiga*, dari segi pemasaran

hasil produksi daerah Riau memiliki keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; keempat, Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT); dan kelima, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Syahza, 2002).

### **Permasalahan Petani Sawit**

Permasalahan yang dihadapi petani sawit di Kabupaten Rokan Hulu dan pedesaan pada umumnya dapat dilihat dari 3 aspek yakni: aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek keuangan atau permodalan.

Aspek produksi yang dihadapi oleh petani sawit adalah skala usaha yang berkisar antara 0,5 hingga dua hektar (petani sedang) dengan teknologi usaha yang masih sederhana dan belum dikelola secara intensif sehingga produksi yang dihasilkan belum optimal. Karena produksi sawit sangat dipengaruhi oleh musim sehingga pada saat panen yang dihasilkan berlimpah harga jual sawit cenderung menurun. Terbatasnya kualitas SDM yang 57,71 persen hanya berpendidikan SD dan 3,1 persen tidak mengenyam pendidikan sehingga kemampuan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang berkualitas masih rendah karena penanganan usahatani sawit yang dilakukan belum intensif (persoalan bibit berkualitas, teknologi budidaya dan panen serta penanganan pasca panen). Bagi petani swadaya yang dalam pengelolaan usaha masih terbatas dalam mendapatkan pembinaan, kualitas produk yang dihasilkan masih lebih rendah dibanding petani plasma maupun petani plasma yang sudah melakukan konversi.

Aspek pemasaran yang dihadapi oleh petani sawit yakni terbatasnya informasi pasar. Keterbatasan informasi pasar akibat letak lokasi usahatani yang jauh di desa (terpencil) disertai pengetahuan dan kemampuan mencari informasi dan menganalisis informasi yang masih terbatas dan ketegantungan kepada pemilik modal (tengkulak) di tingkat desa mengakibatkan posisi tawar petani menjadi rendah. Disisi lain berfluktuasinya harga CPO ditingkat nasional dan internasional akan berpengaruh terhadap harga TBS yang dihasilkan petani.

Aspek permodalan yang dihadapi oleh petani adalah terbatasnya jumlah modal yang dimiliki karena 73,30 persen memiliki modal masih dibawah Rp 50 juta rupiah. Kondisi tersebut mengakibatkan petani menemui pelepas uang (meminjam) guna memenuhi kebutuhan rumahtangganya baik untuk memenuhi kebutuhan usahatani atau kebutuhan konsumsi rumahtangga. Ketergantungan kepada rentenir (tengkulak) mengakibatkan petani terikat untuk memasarkan produksi sawit yang dihasilkan kepada tengkulak karena hutang budi yang telah

dilakukan sehingga membuat para pelepas uang tersebut sangat berperan dalam menentukan harga sehingga posisi tawar petani menjadi rendah.

### Program PPD dalam Pemberdayaan Petani Sawit dengan Konsep TRIDAYA

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang mampu dicapai oleh pemerintah Provinsi Riau ternyata belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan yang terdapat di daerah ini walaupun angka kemiskinan telah mengalami penurunan. Data yang ada menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 8,47 persen yang telah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya 2009 sebesar 9,48 persen dan lebih tinggi lagi di tahun 2007 sebesar 11,20 persen serta tahun 2004 sebesar 22,19 persen. Sebagian besar masyarakat miskin tersebut berada di daerah pedesaan dan umumnya adalah petani.

Kemiskinan umumnya dianalogkan dengan semua sifat kekurangan dan ketidakberdayaan. Dalam arti *proper* kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas kemiskinan merupakan suatu fenomena *multi face* atau multi dimensional.

Chambers, mengatakan, kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolasi*) (Suryawati, 2005).

Kemiskinan dapat dilihat dari dimensi yakni: *kemiskinan absolut*, *kemiskinan relatif*, *kemiskinan kultural*, dan *kemiskinan struktural*. *Kemiskinan absolut*, adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Penentuan kemiskinan absolut ini biasanya diukur melalui 'batas kemiskinan' atau garis kemiskinan'. *Kemiskinan relatif*, adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan 'kondisi umum' satu masyarakat. *Kemiskinan kultural*, mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern). *Kemiskinan struktural*, adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Suharto, 2000).

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,



pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup rasa aman dari perlakuan atau tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan politik baik bagi laki-laki dan perempuan.

Hak-hak dasar masyarakat miskin ini BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain: 1) Pendekatan kebutuhan dasar (*Basic Need Approach*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi; 2) Pendekatan pendapatan (*Income Approach*), kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara *rigid* standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya; 3) Pendekatan kemampuan dasar (*Basic Capabilities Approach*) menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat; 4) Pendekatan obyektif (*Objective Approach*) atau pendekatan kesejahteraan (*Social Welfare Approach*), menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan; 5) Pendekatan subyektif (*Subjective Approach*), menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri.

Faktor yang dianggap berkaitan langsung dengan fenomena kemiskinan di wilayah pedesaan, yaitu: 1) kapabilitas sumberdaya lahan yang rendah; 2) lokasi yang terisolir dan atau terbatasnya sarana dan prasarana fisik; 3) keterbatasan penggunaan modal dan teknologi; 4) lemahnya kemampuan kelembagaan (formal dan non formal) penunjang pembangunan di tingkat pedesaan, dan 5) masih rendahnya akses sosial masyarakat terhadap peluang-peluang bisnis yang ada (Anonymous, 2001 dalam Yuliati dan Purnomo, 2003).

Melihat kepada pengertian atau definisi, dimensi dan factor yang menyebabkan kemiskinan dapat dikatakan bahwa kemiskinan yang terjadi pada petani membuat petani berada pada lingkaran kemiskinan yakni pendapatan yang rendah, gizi dan kesehatan yang rendah, kesempatan pendidikan terbatas, tabungan rendah sehingga produktivitas rendah. Kondisi tersebut berdampak kepada tingkat hidup yang rendah, penghargaan diri yang rendah, dan kebebasan yang terbatas (MP Todaro dalam Fatem, 2011).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi adalah melaksanakan "program K2I" (Penanggulangan Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur). Program tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Keberdayaan masyarakat dilaksanakan antara lain

melalui Program Pemberdayaan Desa (Program PPD). Program ini ditujukan pada masyarakat pedesaan di Provinsi Riau yang pada umumnya terdapat kantong-kantong kemiskinan. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui tiga daur hidup, yang disebut "Tridaya" (TKP3 KPK: 2004) yaitu: 1) Daur Hidup Pengembangan SDM; 2) Daur Hidup Pengembangan Usaha Produktif; dan 3) Daur Hidup Kelembagaan Kelompok orang miskin.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan salah satu kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung tercapainya program KZI dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 di 11 kabupaten/kota yang tersebar pada 48 desa.

Program PPD dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Riau dengan mengalokasikan APBD sebesar Rp 250 juta hingga Rp 500 juta per desa. Sasaran dari program adalah para petani, pedagang, pengusaha industri rumah tangga dan pelayanan jasa. Dana tersebut dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat desa atau kelurahan sebagai dana bergulir guna mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga masyarakat desa yang sebagian besar adalah petani termasuk petani sawit.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana atau prasarana bagi masyarakat desa, serta mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif.

*Tujuan yang ingin dicapai dari program PPD di tingkat desa secara khusus adalah: mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa, menghindari masyarakat dari praktek ijon, meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usah Desa, meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib, dan meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, serta memenuhi kebutuhan sarana atau prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa. Dengan adanya program ini diharapkan mampu membantu keterbatasan modal yang ada pada masyarakat desa dalam mengembangkan usahanya sehingga mampu meningkatkan produktivitas yang akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.*

Kaitan kemiskinan dengan pendapatan masyarakat sayogyo menetapkan garis kemiskinan dengan pendapatan perkapita setahun. Sajogyo membedakan kemiskinan penduduk antara desa dan kota yang

dilihat dari tingkat pengeluaran setara beras per kapita per tahun. Tingkat kemiskinan yang didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per bagi wilayah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan dikatakan miskin apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun, miskin sekali apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun, paling miskin apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Untuk daerah perkotaan dikatakan miskin apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun, miskin sekali apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun, paling miskin apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun (Sajogyo, 1977, dalam Suryawati, 2005).

Kemampuan pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh oleh karena itu strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan yaitu: 1) peningkatan pendapatan orang miskin dan 2) pengurangan pengeluaran orang miskin. (TKP3 KPK, 2004: 14).

Kabupaten Rokan Hulu tahun 2009 memiliki luas areal perkebunan 223.525,0 Ha, 1.925.341 Ha diantaranya merupakan tanaman kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan oleh 100.749 kepala keluarga (KK) dan 940.259 KK diantaranya merupakan pekebunan rakyat yang mampu menghasilkan produksi sebesar 437.972 ton.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani sawit dengan membantu dari sisi permodalan, Program PPD di Provinsi Riau telah mengalokasikan dana sebesar Rp 59.915 juta rupiah yang tersebar pada 632 desa. Di Kabupaten Rokan hulu telah didanai 104 desa.

### Tingkat Keberdayaan dan Ekonomi Rumahtangga Petani Sawit

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata *empowerment* (Oxford English Dictionary), yang mengandung dua pengertian: *pertama, to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain); dan *kedua, to give ability, enable* (usaha untuk memberi kemampuan).

Konsep lain dari pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) dan tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui tiga daur hidup, yang disebut "Tridaya" (TKP3 KPK: 2004) yaitu: 1) Daur Hidup Pengembangan SDM, dalam kelembagaan kelompok Orang Miskin

meliputi: proses penyadaran kritis, pengembangan kepemimpinan bersama atau kolektif, pengembangan perilaku usaha sosial, mampu mengelola usaha bersama atau mikro; 2) Daur Hidup Pengembangan Usaha Produktif dalam kelembagaan kelompok orang miskin meliputi: Pengaturan 'Ekonomi Rumah Tangga' agar mampu menabung bersama dalam kelompok, untuk modal usaha bersama dalam kegiatan usaha produktif; 3) Daur Hidup Kelembagaan Kelompok orang miskin meliputi: pengelolaan organisasi yang akuntabilitas menuju kepemimpinan yang partisipatif, sehingga pengelolaan keuangan yang transparan, dan pengembangan jejaring yang luas.

### 1.1. Keberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani Sawit

Sumber daya manusia merupakan modal dalam melakukan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan, pengalaman usaha, sikap terhadap pekerjaan dan tatanilai maju yang dimiliki. Penelitian terhadap kualitas sumber daya manusia (petani sawit) di Kabupaten Rokan Hulu menggambarkan bahwa tingkat pendidikan petani masih rendah dimana 57,71 persen petani hanya berpendidikan SD dan terdapat 3,6 persen yang tidak mengenyam pendidikan. Alasan utama petani tidak bersekolah yakni: terbatasnya dana yang dimiliki orang tua, mereka harus bekerja membantu orang tua, dan karena menikah. Disamping faktor pendidikan, pengalaman kerja turut menentukan karena menurut Mc Clelland untuk membuat sebuah pekerjaan berhasil, yang paling penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut. Konsep ini dikenal dengan *the need for Achievement (n-Ach)* yakni kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi. Kalau banyak orang yang memiliki *n-Ach* yang tinggi, dapat diharapkan masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Mc Clalanc dalam Budiman, 1995).

Dilihat dari sikap petani hanya 48,5 persen petani yang sudah memiliki orientasi masa depan yang memandang hidup harus berfikir ke depan, tidak cepat menyerah, dan selalu bekerja keras, hal tersebut umumnya terdapat pada petani sawit yang berasal dari suku Jawa dimana sudah dikenal sebagai masyarakat yang rajin dan pekerja keras. Dilihat dari pengalaman petani dalam mengelola usahatani sawit umumnya masih relatif rendah yang berkisar antara 5 sampai 14 tahun (47,45 persen) dan hanya 1,35 persen yang memiliki pengalaman diatas 35 tahun. Pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap keberdayaan petani sawit digambarkan pada Tabell dibawah ini (Rosnita, 2011).



Tabel 1. Keberdayaan Sumber Daya Manusia Petani Sawit di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011

No	Indikator	%	Keterangan
1.	Kemampuan pengajuan proposal pinjaman	39,80	Rendah
2.	Kemampuan membuat profil usaha	31,60	Sedang

Keberdayaan SDM petani sawit masih berada pada katagori rendah dan sedang dalam mengembangkan usaha. Kelemahan SDM menurut Soewardi (2002) adalah: 1), tiadanya orientasi ke depan; 2), tidak ada *growth philosophy*; 3), cepat menyerah; 4), berpaling dari akhirat; dan 5) lamban atau hidup dalam suasana santai.

### 1.2. Keberdayaan Ekonomi Petani Sawit

Pemberdayaan ekonomi petani dapat dilihat dari beberapa variabel ekonomi, seperti: 1) ketersediaan modal; 2) skill; 3) teknologi; dan 4) kemampuan pengelolaan usaha lebih mudah untuk diintervensi melalui program pemberdayaan. Variabel-variabel yang lain seperti: 5) ketersediaan bahan baku; 6) ketersediaan tenaga kerja; 7) pemasaran; dan 8) minat dalam mengembangkan usaha merupakan variabel-variabel yang relatif sulit untuk diintervensi melalui program pemberdayaan (Hidayat dan Syamsulbahri, 2001). Tabel 2 dibawah ini menggambarkan tingkat keberdayaan ekonomi petani sawit.

Tabel 2. Keberdayaan Ekonomi Produktif Petani dengan adanya Program PPD

No	Uraian	Sebelum PPD (%)	Sesudah PPD (%)
1	Modal diatas Rp 100 juta rupiah	08,20	27,00
2	Teknologi tradisional ke semi	13,30	65,30
3	Modren	02,00	14,20
4	Tenaga kerja luar keluarga	08,20	17,30
5	Pemasaran ke luar desa	03,60	22,40
6	Volume Usaha > Rp 80 juta Keuntungan > Rp 6 juta	02,50	08,70

Keberdayaan ekonomi petani sawit dengan adanya program PPD di Kabupaten Rokan Hulu telah mampu: 1) meningkatkan modal usaha petani secara rata-rata dari Rp 16.554.846,94 menjadi Rp 39.103.571,43, 2) meningkatnya penggunaan tenaga kerja luar keluarga, 3) teknologi usaha beralih kepada semi moderen, 4) memperbaiki sistim pemasaran dengan mengurangi ketergantungan pada tengkulak, 5) meningkatkan volume usaha dari rata-rata Rp 25.635.459,18 menjadi Rp 47.669.642,86, 6) dan



meningkatkan keuntungan per bulan dari Rp 1.849.285,71 menjadi Rp 3.445.994,90 (Rosnita, 2011).

Dalam melakukan pengembangan ekonomi rakyat di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk mempercepat pertumbuhan melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Industrialisasi pertanian dalam pengembangan komoditi sawit perlu dilakukan di Provinsi Riau dengan menghasilkan produk turunan selain CPO seperti margarine, sabun, bahan baku kosmetik, dan lainnya sehingga mampu memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada, karena industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) yang akan mampu mendukung iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian terutama kelapa sawit di daerah Riau. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian (Saragih, 2001b). Organisasi bisnis di pedesaan ini berfungsi sebagai lembaga pemasaran produk pertanian.

### 1.3. Keberdayaan Lembaga Keuangan (UED-SP) Petani Sawit

Kelembagaan atau "*social form*", ibarat organ-organ dalam tubuh manusia. Salah satu konsep keberdayaan dari "Tri daya" adalah keberdayaan kelembagaan (dalam penelitian ini Lembaga UED-SP). Keberdayaan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya dan kinerja kelembagaan sehingga lembaga tersebut mampu untuk terus berlanjut. Kapasitas kelembagaan menyangkut bagaimana kemampuan kelembagaan mencapai tujuannya. Kinerja kelembagaan yakni keefektifan dan keefesienan kelembagaan dalam mencapai tujuannya sehingga mampu terus berlanjut (Syahyuti, 2003).

Kapasitas kelembagaan dapat dilihat dari strategi kepemimpinan Ketua UED-SP dan manajemen pelaksanaannya. Kepala desa dalam menetapkan pengelola UED-SP dan pemanfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga penyimpangan dalam peruntukkan penggunaan dana dapat diminimalisir. Sosialisasi disampaikan pada seluruh masyarakat dan dilakukan secara terbuka, disisi lain penetapan pengelola dan peruntukkan penggunaan dana dilakukan dengan musyawarah. Dalam pengelolaan lembaga keterbatasan yang dimiliki adalah kemampuan lembaga UED-SP dalam melakukan kerjasama atau kemitraan dengan lembaga yang terdapat di luar desa.

Kinerja lembaga UED-SP dapat dilihat dari: efektifitas lembaga, efisiensi lembaga, dan keberlanjutan lembaga. Efektifitas lembaga merupakan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuannya yang dapat

P  
k  
n  
si  
d  
  
at  
p  
bi  
se  
w  
ke  
  
ke  
ae  
ke  
pe  
  
ko  
ya  
uti  
me

dilihat dari jumlah masyarakat yang mampu dilayani. Jumlah masyarakat yang mampu dilayani di Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh pemanfaat laki-laki. Pemanfaat pinjaman modal UED-SP berjumlah 7.245 orang yang terdiri dari laki-laki 5.960 orang (82,26 persen) dan perempuan yang hanya 1.285 orang (17,73 persen).

Efisiensi lembaga menggambarkan kemampuan lembaga dalam memanfaatkan dana (dana yang tersedia, yang diserap, perkembangan modal, dan tingkat tunggakan).

Tabel 3. Keberdayaan Lembaga UED-SP di Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Jumlah	%
1	Jumlah Masyarakat yang dilayani		
	a. Laki-laki (Orang)	5.960	
	b. Perempuan (Orang)	1.285	
2	Besar dana ( Rp juta )	220.000	
3	Serapan ( Rp juta )	23.507	
4	Perkembangan Modal ( Rp juta )	66.441	
5	Tunggakan UED-SP ( Rp juta )	1.176	03,29
6	Tunggakan SP ( Rp juta )	64	05,30

Sumber : BPPDKB

Keberlanjutan lembaga dilihat dari perkembangan usaha petani, perguliran dana, kemampuan lembaga menciptakan lapangan kerja, dan kemampuan lembaga untuk berubah menjadi BUMDES. Usaha petani mengalami peningkatan, dana telah mampu digulirkan lebih dari 3 kali, sehingga lembaga tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang ditunjukkan bahwa lembaga UED-SP mampu menjadi BUMDES.

Besarnya angka kemiskinan di pedesaan salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya pendapatan yang diterima sebagai akibat rendahnya produktivitas tenaga kerja, upah riil yang diterima juga rendah. Kurang berkembangnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas kerja di sektor ekonomi pedesaan menyebabkan mengalirnya tenaga kerja ke wilayah perkotaan dan telah terjadi pergeseran usaha dari sektor pertanian keluar dari sektor pertanian.

Struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana. Sumber pendapatan di sektor pertanian adalah merupakan kontribusi dari pendapatan usaha pertanian (sawah, kebun, ternak, ikan, dan lainnya). Tabel 4 menggambarkan struktur pendapatan rumahtangga petani sawit di Kabupaten Rokan Hulu.

Struktur pendapatan rumahtangga pada Tabel 4 menggambarkan kontribusi sektor pertanian lebih besar dibanding sektor di luar pertanian yang berarti sektor pertanian masih tetap menjadi sumber pendapatan utama rumahtangga petani. Usaha perkebunan (karet dan sawit) masih memberikan kontribusi terbesar terhadap kontribusi pendapatan dari sektor

pertanian. Telah terjadi penurunan kontribusi sektor perkebunan terhadap pendapatan rumah tangga petani, hal ini terjadi karena. Pada sektor pertanian (sub sektor usahatani) telah terjadi pergeseran usaha dari usaha perkebunan dan perikanan kepada usaha peternakan yang ditandai dengan menurunnya proporsi usaha perkebunan dan perikanan dan meningkatnya proporsi usaha peternakan, hal ini dikarenakan jatuhnya harga sawit antara bulan Juli hingga bulan Desember 2008. Pada usaha non pertanian telah terjadi pergeseran usaha dari usaha buruh kepada usaha perdagangan yang dapat dilihat dari proporsi pendapatan buruh dan kiriman mengalami penurunan dan perdagangan mengalami peningkatan. Hal ini berarti adanya lembaga UED-SP melalui program PPD telah mendorong diversifikasi usaha di luar sektor pertanian.

Tabel 4. Struktur Pendapatan Rumah tangga Petani Kondisi Sebelum dan Setelah Program PPD (Rp/Bln)

Sumber Pendapatani			Sebelum PPD		Setelah PPD	
			Rp	%	Rp	%
Pertanian	Usaha Tani	Sawah	156.147,96	3,49	199.030,61	2,82
		Kebun	3.116.836,73	69,76	4.823.418,37	68,34
		Ternak	337.704,08	8,45	778.877,55	11,04
		Ikan	5.102,09	0,11	6.122,45	0,09
		Lainnya	4.081,63	0,09	20.408,16	0,29
		Total Usahatani	3.659.872,49	81,91	5.827.857,14	82,57
	Usaha Tani Luar	Buruh Pertanian	186.224,49	4,17	233.673,47	3,31
		Sewakan Alat	5.102,04	0,11	5.102,04	1,11
		Lainnya	750.000,00	0,09	7.397,96	0,10
		Total Luar Usahatani	195.153,06	4,37	246.173,47	3,49
	Total Pertanian			3.855.025,56	86,28	6.074.030,61
Non Pertanian		Perdagangan	338.010,20	7,57	536.224,49	7,60
		Angkutan/Jasa	173.979,59	3,89	286.224,49	4,06
		Industri Non Pertanian	5.612,24	0,13	23.469,39	0,33
		Buruh	71.428,57	1,60	86.479,59	1,23
		Kiriman	10.204,08	0,23	10.714,29	0,15
		Lainnya	13.775,51	0,31	40.816,33	0,58
		Total Non Pertanian	613.010,20	13,72	983.928,57	13,94
Total Pendapatan			4.468.035,76	100,00	7.057.959,18	100,00



Besar pendapatan petani perkebunan di Provinsi Riau per bulan sebesar Rp 3.293833,42 dan membandingkan dengan pendapatan petani sawit di Rokan Hulu, maka secara rata-rata pendapatan petani sawit di Rokan Hulu (Rp 5.827.857,14) berada diatas rata-rata pendapatan petani daerah Riau.

Kaitan antara pendapatan dan kemiskinan dapat dilihat dari distribusi pendapatan diantara masyarakat yang akan menggambarkan ketimpangan pendapatan diantara masyarakat. Bank Dunia (BPS,2008: 37) mengurutkan pendapatan diantara kelompok masyarakat dari jumlah pendapatan yang paling rendah hingga ke jumlah pendapatan yang paling tinggi dengan membagi kedalam 3 katagori yakni : jika 40 persen penduduk lapisan bawah yang berpendapatan rendah menikmati kecil dari 12 persen dari proporsi pendapatan, maka ketimpangan pendapatan dikatakan tinggi, jika proporsi pendapatan yang dinikmati 12 persen hingga 17 persen dikatakan dengan ketimpangan sedang, dan jika proporsi pendapatan yang dinikmati diatas 17 persen, maka dikatakan dengan ketimpangan rendah atau distribusi merata. Tabel 5 dibawah ini menggambarkan proporsi distribusi pendapatan diantara petani sawit di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 5. Proporsi Distribusi Pendapatan diantara Petani di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011.

No	Kelas dan Persentase Penduduk	Besar Pendapatan Rumah tangga / Tahun (Rp juta)	Proporsi Pendapatan (%)	
			Sebelum PPD	Setelah PPD
			1	Lapisan Tinggi (20 %)
2	Lapisan Sedang (40 %)	19,2 - 48	27,70	24,90
3	Lapisan Bawah (40 %)	3,6 - 19,2	9,60	11,70

Sumber: Data primer (Olahan) Rosnita, 2011

Tabel 5 menggambarkan bahwa telah terjadi distribusi pendapatan dari lapisan tinggi kepada lapisan bawah, akan tetapi peningkatan proporsi pendapatan yang dinikmati oleh petani lapisan bawah jika dilihat dari klasifikasi ketimpangan pendapatan yang digambarkan oleh Bank dunia pada kondisi sebelum dan setelah adanya program PPD berada pada ketimpangan tinggi karena masih berada dibawah 12 persen pada kondisi sebelum dan setelah adanya program PPD.

Berdasarkan besar pendapatan, apabila tingkat pendapatan relatif rendah maka seseorang memprioritaskan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi pangan dibanding non pangan. Seiring dengan peningkatan

pendapatan, proporsi pengeluaran untuk bahan makanan akan menurun dan meningkat untuk kebutuhan non pangan. Kondisi tersebut menggambarkan perbaikan kondisi kemiskinan yang dihadapi masyarakat, apakah pendapatan dibelanjakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan saja atautkah pangan dan non pangan. Tabel 6 menggambarkan struktur pengeluaran rumahtangga petani.

Hukum Working menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pangsa pengeluaran pangan dengan pengeluaran total rumahtangga (Pakpahan et al, 1993). Dilihat dari kesejahteraan, rumahtangga dengan pangsa pengeluaran pangan tinggi tergolong rumahtangga dengan tingkat kesejahteraan rendah relatif dibanding rumahtangga dengan porsi pengeluaran untuk pangan yang rendah (Rachman, HPS, 2001).

Dilihat dari proporsi pengeluaran rumahtangga, alokasi pengeluaran terbesar dibelanjakan kepada non pangan dan meningkat setelah adanya program PPD. Proporsi pengeluaran untuk pangan menurun setelah adanya program PPD. Proporsi pengeluaran konsumsi non pangan mengalami peningkatan kecuali kesehatan dan alat kesehatan.

Kategori petani yang sudah berada tingkat sejahtera karena proporsi pengeluaran untuk pangan lebih kecil dibanding dengan non pangan baik pada kondisi sebelum maupun setelah adanya program PPD. Meskipun distribusi pendapatan berada pada ketimpangan yang tinggi akan tetapi telah terjadi peningkatan kesejahteraan petani yang ditandai menurunnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan dan meningkatnya pengeluaran konsumsi non pangan setelah adanya program PPD, karena menurut Engel pangsa pengeluaran pangan terhadap pengeluaran rumahtangga akan semakin berkurang dengan meningkatnya pendapatan (Deaton dan Muellbauer, 1980). Jika harga barang dan selera tetap, maka peningkatan pendapatan akan meningkatkan kesejahteraan karena peningkatan pendapatan dialokasikan untuk meningkatkan pengeluaran non pangan. Secara empiris terbukti bahwa semakin tinggi pendapatan rumahtangga semakin rendah pangsa pengeluaran untuk pangan (Pakpahan et al, 1993; Rachman, HPS, 2001 dalam Saliem dan Ariningsih, 2008).

Tabel 6. Struktur Pengeluaran Rumah tangga Petani Kondisi Sebelum dan Setelah Program PPD (Rp/bln).

Jenis Pengeluaran		Sebelum PPD		Setelah PPD		
		Rp	%	Rp	%	
Pangan	Pangan	Karbohidrat	125.686,45	8,68	180.943,88	9,04
		Hewani	74.500,00	5,15	106.122,45	3,14
		Kacangan	44.112,24	3,05	62.882,65	5,30
		Sayur, buah	55.056,12	3,80	69.321,43	3,46
		Minyak	55.530,61	3,84	74.622,45	3,73
		Minuman	57.709,18	3,71	74.346,94	3,71
		Bumbu	47.984,69	3,31	62.143,21	3,10
		Rokok	107,14	0,01	74.423,47	3,72
		Lainnya	51.276,02	3,54	71.699,49	3,58
	Total Pangan		563.906,35	38,95	776.505,97	38,77
Non Pangan	Non Bahan Bakar	Pakaian	101.974,49	7,04	165.566,33	8,27
		Pendidikan	200.051,02	13,82	252.959,18	12,63
		Kesehatan	73.877,55	5,10	100.188,78	5,00
		Alat Kesehatan	54.821,53	3,79	73.107,14	3,65
		Transportasi	48.290,82	3,34	68.290,82	3,41
		Rehab Rumah	46.198,98	3,19	67.244,90	3,36
		Sosial	36.071,68	2,49	59.566,99	2,97
		Pajak/Iuran	49.495,20	3,42	79.183,83	3,95
		Rekreasi	40.525,51	2,80	52.627,55	2,63
		Lainnya	63.673,47	4,40	79.617,35	3,98
		Total Non Bahan Bakar		714.980,26	49,38	998.352,86
	Kayu	4.336,73	0,30	5.127,55	0,26	
	Minyak Tanah	84.831,63	5,86	114.989,80	5,74	
	Gas	16.173,93	1,12	26.531,07	1,32	
	Listrik	63.642,86	4,40	81.132,65	4,05	
Total Bahan Bakar		169.005,56	11,67	227.781,07	11,37	
Total Non Pangan		883.985,82	61,05	1.226.133,93	61,23	
Total Pengeluaran		1.447.892,17	100,00	2.002.639,90	100,00	



Distribusi kemiskinan petani responden dapat dilihat dari besar pengeluaran per anggota keluarga per tahun yang disetarakan dengan beras. Untuk daerah perdesaan dikatakan tidak miskin, miskin, miskin sekali, dan paling miskin apabila pengeluaran per anggota keluarga per tahun lebih besar atau sama dengan 320 kg, lebih kecil dari pada 320 kg, lebih kecil daripada 240 kg, dan lebih kecil daripada 180 kg (Sajogyo, 1977, dalam Suryawati, 2005). Berdasarkan harga beras di pasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 sebesar Rp 6.744,-, Tabel 7 menggambarkan distribusi jumlah kilogram beras per anggota keluarga.

Tabel 7. Tingkat Kemiskinan Petani Dilihat dari Besar Pengeluaran per Anggota Keluarga per Tahun setara Beras di Kabupaten Rokan Hulu.

No	Tingkat Kemiskinan (Rp/ Anggota Keluarga/ Tahun)		Sebelum PPD		Sesudah PPD	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak Miskin	$\geq 320$ kg	191	97,45	191	97,45
2	Miskin	240 - 320 kg	4	2,04	1	0,51
3	Miskin Sekali	180 - 240 kg	1	0,51	4	2,04
4	Paling Miskin	< 180 kg	0	0,00	0	0,00

Program PPD yang mampu meningkatkan pendapatan petani (Tabel 4) mampu meningkatkan kesejahteraan petani yang tergambar dari proporsi pengeluaran non pangan lebih besar dari pangan (Tabel 6), akan tetapi krisis ekonomi yang melanda pada tahun 2008 pengaruhnya dirasakan pada petani miskin dan miskin sekali dan tidak pada petani tidak miskin (Tabel 7). Tabel 7 menggambarkan bahwa dari sisi pengeluaran setara beras proporsi petani miskin sekali mengalami peningkatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa program PPD keberadaannya dirasakan pada kelompok petani tidak miskin. Pada petani miskin dan miskin sekali sangat rentan terhadap pengaruh yang datang dari luar (krisis ekonomi dunia berpengaruh terhadap harga TBS yang terus menurun dan meningkatnya harga barang kebutuhan berpengaruh terhadap kemampuan pengeluaran petani. Kondisi ini menjadikan distribusi pendapatan petani berada pada ketimpangan tinggi (Tabel 5).

Kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi ini bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan petani tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan program jika dalam implementasi pelaksanaan program tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan miskin sekali serta masyarakat paling miskin.

## Penutup

Provinsi Riau memiliki potensi dalam pengembangan produksi kelapa sawit meskipun masih ditemui permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh petani baik dari sisi produksi, pemasaran dan permodalan. Kemampuan SDM petani masih rendah dalam pengembangan usaha perkebunan sawit yang ditunjukkan oleh ketidakmampuan petani dalam aspek produksi, disisi pemasaran ketidakmampuan dalam menyusun proposal pinjaman guna pengembangan usaha dan profil usaha. Keberdayaan lembaga UED-SP dapat dilihat dari kinerja lembaga yang sudah efisien yang ditunjukkan dengan besarnya tunggakan yang hanya sebesar 5 persen dan telah mempunyai lembaga tersebut menjadi BUMDES di beberapa desa. Program PPD telah mampu meningkatkan pendapatan dan pengeluaran petani sawit akan tetapi ketimpangan distribusi pendapatan masih tinggi dan manfaat program hanya dirasakan oleh kelompok petani yang berada pada katagori tidak miskin.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan perlu mendapatkan pembinaan yang lebih intensif sehingga petani mampu meningkatkan kualitas produksi yang dihasilkan, memiliki posisi tawar yang tinggi dan harga yang pantas dan memiliki modal yang cukup. Untuk dukungan pemerintah terhadap ketersediaan penyuluh sangat menentukan dalam menunjang kemampuan petani sehingga mampu menghasilkan produksi TBS, CPO ataupun produk turunan yang sesuai dengan selera pasar.

Perlu peningkatan kualitas SDM petani dalam pengembangan usaha melalui pelatihan yang dibutuhkan oleh petani seperti kewirausahaan, penyusunan proposal dalam berinteraksi dengan pihak bank dan perlu dilakukan Industrialisasi pertanian dengan menghasilkan produk turunan selain CPO seperti margarine, sabun, bahan baku kosmetik, dan lainnya sehingga mampu memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Perlu keberpihakan kepada masyarakat miskin karena Program PPD yang dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan petani tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan program jika dalam implementasi pelaksanaan program tidak berpihak kepada masyarakat miskin

## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS, 2004. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals). Jakarta: Bappenas
- Budiman, 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Fatem, 2011. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Partisipasi dalam Pembangunan. Unpad Press. Bandung